



Buletin Parlementaria

Distribusi Beras Harus Merata



**3 Pamer Produk
Legislasi RI
ke Parlemen
Perancis**



**17 Perlu Edukasi
Masif Cegah
Meningkatnya
HIV/AIDS di
Batam**

Nomor 1284/II/III/2024 • Maret 2024



9 772614 339005



Distribusi Beras Harus Merata

Menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta pemerintah memperhatikan pendistribusian pasokan beras Bulog ke pasar-pasar tradisional di Indonesia. Ia juga mendorong agar pendistribusian beras dilakukan secara merata.

"Jangan hanya pasar modern yang mendapatkan gelontoran beras dari Bulog jika ingin harga beras turun. Pasar tradisional juga harus mendapatkan pasokan beras dari Bulog sebab panen dari petani saat ini jumlahnya masih terbatas," ungkap Sudin dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog Bantul, Provinsi DIY, Sabtu (2/3).

Di tempat berbeda, Anggota Komisi IV DPR Hermanto menilai, upaya Perum Bulog dengan menggelontorkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan komoditi pangan murah di lokasi-lokasi yang dekat dengan masyarakat, belum terlalu signifikan menurunkan harga.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat perbedaan data harga, antara yang berasal dari Bulog maupun dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Menurut Bulog, ada tren penurunan harga, tetapi kalau di panel harga pangan milik Bapanas maka ada kecenderungan meningkat.

"Jadi, menurut saya perlu pengaturan tata niaga yang baik, supaya informasi-informasi kenaikan harga yang terpublikasi sekarang ini harus dibenahi supaya tidak terjadi dampak psikologis harga kepada masyarakat," kata Hermanto saat

ke Gudang Bulog Tambak Aji di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/3).

Sementara saat berkunjung di gudang bulog Surabaya, Kamis (2/3), Anggota Komisi IV DPR RI Endro Purnomo menyoroti keberpihakan pemerintah kepada para petani dengan memberikan modal pertanian seperti pupuk dan juga bibit. Hal ini agar para petani dapat berproduksi lebih banyak lagi sehingga kedepan dapat mengurangi impor.

Lanjutnya, Politisi Fraksi Partai Gerindra juga meminta kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan sarana pertanian seperti irigasi sehingga pertanian dapat lebih kuat dengan adanya perubahan iklim seperti yang saat ini terjadi serta penyediaan pupuk bagi para petani agar bisa ditambahkan. Lantaran masih banyak sekali petani yang mengeluh sulit untuk mendapatkan pupuk. ➡ tra.jk.gal/aha



FOTO: TRA/PDT

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog Bantul, Provinsi DIY, Sabtu (2/3/2024).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Pamer Produk Legislasi RI ke Parlemen Perancis



FOTO: IST/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers' Summit 2024 di Paris, Prancis.

Ketua DPR RI Puan Maharani memamerkan produk hukum yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan kepada Ketua Majelis Nasional Prancis, Madame Yaël Braun-Pivet. Masalah seputar peranan perempuan di Indonesia dan Prancis menjadi salah satu bahasan pada pertemuan yang terselenggara di Palais Bourbon, Gedung Parlemen Prancis pada Selasa (5/3).

Dalam pertemuan bilateral tersebut merupakan salah satu agenda dalam lawatan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau *Women Speakers' Summit* 2024. Puan menegaskan Indonesia memiliki banyak produk hukum yang mendukung hak-hak dan

perlindungan perempuan.

DPR di bawah kepemimpinan Puan juga banyak menghasilkan dan mengusulkan produk legislasi yang mendukung hak-hak perempuan. Misalnya UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Puan juga menyampaikan bahwa di periode kepemimpinannya telah terjadi banyak *affirmative action* untuk mendukung agar syarat 30% calon anggota parlemen perempuan dari parpol dilaksanakan.

"UU TPKS menjadi UU anti-kekerasan seksual dan lewat RUU KIA, kami mendorong adanya hak cuti ayah bagi pekerja yang istrinya melahirkan," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

uc/aha



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P. Ridwan Budiman, S.I.P. Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md.
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom. Hira Askamal, S.I.Kom. Bianca Destianti, S.I.Kom. Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom. Wilga Emilson, S.Sos. Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom. Nadhen Iwan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom. Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonmaricha Firista Dysie, Balggys Maesynthra, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afrhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E. Larissa Amanda Indrianti Sjahhan, S.I.P. Eki Baehaki, S.Sos. M. Rizki Ramadhani, S.I.Kom. M. Rizki Nugraha, Sunanya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom. Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrusna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Daftar ASN Jangan Coba-coba Pakai Joki

Komisi II DPR RI mengimbau kepada para anak muda yang ingin daftar menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar jangan coba-coba menggunakan joki.

Sebab, sistem penerimaan ASN yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 ini, akan lebih termonitor dengan ketat. Sehingga, praktik-praktik kecurangan dari tiap tahap penerimaan seleksi CASN akan lebih dapat diantisipasi.

"Karena itu saya mengimbau

”

DI JAWA TIMUR MENERIMA (LAPORAN) ADA INFORMASI PERJOKIAN SAAT PENERIMAAN CPNS. KITA INGIN MENGECEK DARI PERTEMUAN INI KARENA KITA INGIN NEGARA INI HIDUP DALAM SITUASI YANG JUJUR.

kepada generasi muda, anak-anak muda, yang ingin masuk di ASN, saya pastikan bahwa sekarang tidak bisa diakali. Jadi tidak ada calo-calo yang bermain," ujar Anggota Komisi II DPR RI Riyanta di sela-sela Kunjungan Kerja Tim Komisi II ke Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Rabu (6/3).

Andaipun masyarakat mendengar masih ada orang-orang yang seolah-olah bisa membantu untuk lolos CASN, maka, tambahannya, dipastikan itu adalah penipu. "Karena juga baru kemarin saya diminta untuk membantu untuk masuk TNI AU, saya katakan tidak bisa membantu. Ini saya katakan, tidaklah benar," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) telah meringkus pria inisial AW (60) yang diduga menjadi otak sindikat joki tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan RI tahun 2023. Terbongkarnya kasus ini berawal dari Tim Intelijen Kejati Jatim yang mengamankan perempuan inisial EYD penjoki pada tes CPNS Kejaksaan RI.

"Di Jawa Timur menerima (laporan) ada informasi perjokian saat penerimaan CPNS. Kita ingin mengecek dari pertemuan ini karena kita ingin negara ini hidup dalam situasi yang jujur. Jadi, jangan dibiasakan dengan hal-hal yang tidak jujur. Pegawai negeri itu seluruh penyelenggara negaranya harus jujur," ujar Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal di kesempatan yang sama.

Politisi Fraksi PPP ini meyakini BKN dan segenap mitra yang terlibat dalam CASN tersebut sudah memperkuat sistem pengawasan.

rdn



FOTO: RDN/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta di sela-sela Kunjungan Kerja Tim Komisi II ke Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Rabu (6/3/2024).



Komisi III Apresiasi Kejati Jambi Bangun 128 Rumah ‘Restorative Justice’

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, menyambut positif ketersediaan 128 Rumah *Restorative Justice* (RJ) oleh Kejaksaan Tinggi Jambi yang telah diresmikan pada Oktober tahun lalu.

Ia menilai hal ini bisa menjadi upaya kejaksaan untuk menegakkan keadilan kepada masyarakat dilini yang paling bawah, yang dapat diselesaikan

melalui prinsip keadilan restoratif.

"Enggak ada yang salah, mereka (kejaksaan) sudah mencoba untuk menyediakan wadah sebagai wujud itikad baik kejaksaan. Perkara datanya (perkara) belum sampai 128, itu lain hal," jelas Arteria kepada **Parlementaria** usai mengikuti pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Jambi pada Kunjungan Kerja Reses Komisi III ke Jambi, Jumat (1/3).

Selaras yang disampaikan Arteria, Anggota Komisi III Heru Budi

juga mengapresiasi hal tersebut. Namun, Heru mengingatkan agar pembangunan rumah RJ ini juga terus dievaluasi.

"Komisi III tentu akan mendukung itu selama itu efektif. Tapi kalau kemudian misalnya justru malah itu terjadi indikasi pemborosan anggaran, saya kira juga perlu dievaluasi. Tapi sejauh ini tadi hasil laporan dari teman-teman kejaksaan tinggi masih berjalan dengan baik," pungkas Heru.

— syn/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat bertukar cenderamata di sela-sela pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Jambi pada Kunjungan Kerja Reses Komisi III ke Jambi, Jumat (1/3/2024).

FOTO: SHIN/PDI

Adde Rosi Ingatkan Hakim Tak Permudah Putusan Cerai

Tingginya kasus perceraian di Banten dipengaruhi berbagai permasalahan.

Salah satunya, faktor ekonomi yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Selain itu, kemajuan teknologi juga memberikan andil bagi awal mula terjadinya keretakan rumah tangga. Masalah ini menjadi perhatian Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa yang meminta hakim di Pengadilan Agama tidak mempermudah putusan perceraian.

"Tingginya kasus perceraian di Banten, disinyalir karena banyaknya pernikahan dini atau belum matang berumah tangga, kemudian banyak pernikahan disebabkan hamil di luar nikah atau dipaksakan. Namun, kita meminta hakim selaku mediator selalu meminta kepada kedua belah pihak berdamai agar perceraian tidak terjadi," ujar Adde Rosi Khoerunnisa saat Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan tiga lembaga peradilan se-wilayah Provinsi Banten, di Tangerang, Banten, Senin (4/3).

Lebih lanjut, Adde Rosi mengungkapkan bahwa pengadilan agama Serang, dengan program isbat nikah setiap tahun dilaksanakan dan didukung Pemkab Serang dan Pemkot Serang. Menurutnya, kalau ada pernikahan tidak sesuai undang-undang, misalnya nikah siri kemudian disahkan pada isbat nikah, maka hak anak dan istri dalam pernikahan tersebut menjadi legal. Bila terjadi perceraian pun, hak anak dan istri

bisa terus diberikan karena sudah sesuai undang-undang yang berlaku.

"Kami terus mendorong agar isbat

”

TINGGINYA KASUS PERCERAIAN DI BANTEN, DISINYALIR KARENA BANYAKNYA PERNIKAHAN DINI ATAU BELUM MATANG BERUMAH TANGGA, KEMUDIAN BANYAK PERNIKAHAN DISEBABKAN HAMIL DI LUAR NIKAH ATAU DIPAKSAKAN. NAMUN, KITA MEMINTA HAKIM SELAKU MEDIATOR SELALU MEMINTA KEPADA KEDUA BELAH PIHAK BERDAMAI AGAR PERCERAIAN TIDAK TERJADI.

nikah bisa terus berlangsung di setiap kabupaten/kota walaupun memang dalam setiap pelaksanaannya ada kendala. Misalnya anggaran, kurang ada komunikasi yang baik dengan Pemda masing-masing. Kalau ini berjalan dengan baik dan Komisi III DPR terus men-*support* anggaran dari pengadilan agama dan pengadilan tinggi Banten cukup baik, mudah-mudahan segala macam program berjalan baik," ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia menekankan tidak mau mencampuri masalah internal rumah tangga. Tapi, dirinya berharap agar masyarakat bisa menjadi keluarga sakinah mawadah dan warohmah yang terhindar dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). — man/rdn



FOTO: MAN/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan tiga lembaga peradilan se-wilayah Provinsi Banten, di Tangerang, Banten, Senin (04/03/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Hinca Pandjaitan: BNN Bubar atau Sangar!

Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Pandjaitan meminta agar Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Utara sangar dalam pemberantasan narkotika. Sebab, Indonesia sudah menandatangani ratifikasi terkait penanggulangan narkotika di tingkat dunia.

"Saya tulis bukunya, BNN: Bubar atau Sangar. Kalau tidak mau bubar maka tangkaplah itu jaringan narkoba tetapi jika tidak mau sangar, saya minta dibubarkan saja," kata Hinca saat diwawancarai di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (28/2).

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menilai bahwa BNN dalam pelaksanaan penanggulangan narkotika masih begitu-begitu saja. Untuk itu, pihaknya tegaskan kalau BNN tak mau bubar maka harus sangar.

"Nah kalau tanya saya, pilih mana bubar atau sangar? Ya sangar, karena itu merupakan kewajiban Indonesia memerangi narkoba dan saya minta kepada BNN ada terobosan besar untuk penanggulangan narkotika ini," tegas Hinca.

Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara III itu mengatakan bahwa pemberantasan narkoba tersebut BNN menjadi leading sector. Sehingga, ia memastikan terkait penambahan anggaran akan diperjuangkan oleh Komisi III DPR. Karena itu, ia pun mengajak BNN agar dapat membuat permintaan anggaran yang besar

”

NAH KALAU TANYA SAYA, PILIH MANA BUBAR ATAU SANGAR? YA SANGAR, KARENA ITU MERUPAKAN KEWAJIBAN INDONESIA MEMERANGI NARKOBA DAN SAYA MINTA KEPADA BNN ADA TEROBOSAN BESAR UNTUK PENANGGULANGAN NARKOTIKA INI.

untuk memberantas narkotika ini.

Di kesempatan yang sama, Kepala BNN Provinsi Sulut, Pitra A. Ratulangi mengungkapkan rasa terima kasih. Oleh karena dengan kehadiran Komisi III DPR ke Sulut dianggap dapat memberikan semangat baru dalam penanggulangan narkoba.

"Terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah mendengarkan aspirasi yang kami sampaikan, semoga kedepan anggaran kami dapat bertambah untuk dapat membuat terobosan baru," kata Pitra. ➡ cas/rdn



FOTO: CAS/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Pandjaitan di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (28/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Beli Ikan Segar Guna Tingkat Kesejahteraan Nelayan Demak

Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan mendorong agar PT. Sumber Samudera Indonesia (SSI) yang memiliki fokus bisnis pengolahan ikan, agar memberikan dukungan konkret untuk kesejahteraan nelayan. Salah satunya, dengan membeli ikan segar dari para nelayan dengan harga yang bisa menyejahterakan kehidupan mereka.

Hal tersebut disampaikan Budhy saat memimpin Kunker Tim Komisi IV DPR mengunjungi PT SSI di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. "Saya pribadi selalu mendorong agar perusahaan-perusahaan perikanan yang menyerap hasil tangkapan ikan dari para nelayan membeli dengan

harga yang bisa menyejahterakan para nelayan," ucap Budhy di Demak, Jawa Tengah, Kamis (29/2).

Selain itu, Legislator Dapil Jabar III ini juga meminta, agar PT SSI yang memang perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) secara langsung lebih banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. Kemudian, perusahaan ini juga wajib melakukan alih teknologi melalui pelatihan kerja kepada pekerja lokal di perusahaan tersebut. Hal ini telah diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

"Menurut saya, keberadaan perusahaan modal asing di Indonesia harus kita dukung bersama selagi menguntungkan buat negara dan masyarakat. Karena memang

realitanya dapat membuka peluang kerja bagi tenaga kerja warga negara Indonesia dan membuka pula peluang terjadinya transfer atau alih teknologi melalui pelatihan kerja yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja lokal. Tentu ini bisa merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi IV DPR Hermanto. Ia menilai pada praktiknya mengenai penentuan harga beli ikan di tingkat petani pasti ada *cost and benefit*. Sehingga ketika *cost and benefit* ini dibalikkan dengan permintaan masyarakat, tentu ini adalah harus dipertimbangkan bagaimana harga yang layak bagi nelayan dan juga bagi pelaku usaha.

jk/rdn



FOTO: IKA/PDT

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan saat memimpin Kunker Tim Komisi IV DPR mengunjungi PT SSI di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.



Setuju Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Ditunda

Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip menyatakan persetujuannya dengan adanya penundaan terhadap penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023 tentang Relaksasi Kebijakan pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur. Sebelumnya kebijakan ini diharapkan dapat mulai diterapkan pada tahun 2024 namun ditunda ke tahun 2025.

I Made Urip meminta Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk melakukan kajian kembali terhadap kebijakan penangkapan terukur tersebut. Lantaran kebijakan tersebut dinilai belum berpihak dan menguntungkan nelayan-nelayan kecil.

"Harus dikaji terlebih dahulu supaya benar-benar kebijakan ini menguntungkan terutama para nelayan-nelayan kecil yang ada di pesisir-pesisir itu," ujar I Made Urip ketika mengikuti kunjungan reses Komisi IV ke Kantor Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/2).

Indonesia yang sebagian besar wilayahnya perairan dan masyarakat pesisirnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan ini, menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu perlu diprioritaskan.

Oleh sebab itu penelaahan dan pengkajian terhadap kebijakan penangkapan terukur ini perlu

”

HARUS DIKAJI TERLEBIH DAHULU SUPAYA BENAR-BENAR KEBIJAKAN INI MENGUNTUNGKAN TERUTAMA PARA NELAYAN-NELAYAN KECIL YANG ADA DI PESISIR-PESISIR ITU.

dilakukan agar nelayan kecil ini juga mendapatkan keuntungan dan kebijakan tersebut tidak malah berpihak terhadap pengusaha besar saja.

"Sehingga jangan sampai kebijakan yang terkait dengan penangkapan terukur yang berbasis kuota ini seolah-olah hasil laut kita itu sudah di kavling-kavling kemudian yang mendominasi nanti itu adalah oligarki terutama para konglomerat nanti. Sehingga temen-temen para nelayan kecil ini yang merupakan wong cilik ini perlu betul-betul mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini, jangan sampai dia terlantar," tegasnya. **gal/aha**



Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip saat mengikuti pertemuan kunjungan reses Komisi IV ke Kantor Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/2/2024).

FOTO: GAL/PDI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Keberlangsungan Karst Gunungkidul Harus Diteliti Lebih Dalam

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menilai perlu ada kajian mendalam terkait dampak lingkungan dan potensi bencana yang diakibatkan dari keberlangsungan investasi di ekosistem Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK) Gunungkidul. Diketahui, kondisi alam Gunung Kidul serta kondisi masyarakatnya yang ramah, sangat menarik perhatian para investor swasta untuk berinvestasi di Gunungkidul.

"Agar kedepannya apakah keberlangsungan ekosistem KBAK ini still in use (masih bisa dipergunakan), expired, atau bagaimana ini harus bisa kita maintain kembali dan tentu harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar situ juga," ujar Riezky dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke He Ha Ocean View Girikarto, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY, Jumat (1/3).

Politisi Fraksi PDIP itu menambahkan, investasi pada hakikatnya tidak boleh merusak alam dan lingkungan, sehingga perlu dihitung daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mengingat Gunungkidul memiliki salah satu ekosistem yang dilindungi oleh UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Ekosistem Karst. Ekosistem karst di Gunungkidul juga telah ditetapkan oleh UNESCO menjadi Geopark dunia.

"Pada prinsipnya terkait lingkungan, kami Komisi IV tidak peduli itu siapa (investornya) selama

strict pada peraturan yang berlaku. Fungsi pengawasan kami terhadap mitra-mitra kerja, terhadap suatu wilayah kami tidak subjektif. Akan tetapi perlu diingat bahwa ada aturan yang dipijak oleh pemerintah untuk berangkat ke satu titik, ke titik lainnya itu yang harus dijaga," ungkap Riezky.

Lebih lanjut, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 jo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur pelaku usaha perlu memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh amdal dan NIB, Riezky

sepakat dapat mempermudah para investor untuk membuka usaha di kawasan lindung geologi. Namun, ia mengingatkan kemudahan tersebut perlu dikaji mendalam dengan memperhatikan ekosistem yang ada di dalam lingkungan.

"NIB, amdal itu kan dengan adanya UU Ciptaker itu mempermudah. Akan tetapi perlu juga diingat, kita setuju investasi masuk, akan tetapi kita juga perlu tahu bahwa alam ini butuh dijaga, dan harus ada juga aturan yang menjaga keberlanjutannya seperti apa," tandasnya. **tra/rdn**



FOTO: TRA/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke He Ha Ocean View Girikarto, kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY, Jumat (1/3/2024).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Abrasi Pantai Kuta Sudah Capai 30 meter

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menemukan fakta pasir pantai di Kuta, Bali, telah mengalami abrasi hingga 20-30 meter sejak tahun lalu. Temuan itu didapat saat melakukan kunjungan kerja DPR RI dalam rangka pengawasan pengembangan Pelabuhan Bena Pelindo dan Bandara Ngurah Rai.

"Kami mendapatkan

informasi ada beberapa kawasan di pulau Bali ini terjadi penyusutan karena kena abrasi itu sampai

hampir 20-30 meter per tahun. Ini sangat berbahaya sekali tentunya untuk pulau Bali yang begini

”

TADI DALAM DISKUSI, IBU DIRJEN PEMBANGUNAN DESA BAHWA DESA-DESA DI YOGYAKARTA ITU SUDAH LEVEL MAJU BAHKAN MANDIRI, GAK ADA LAGI DESA TERTINGGAL. TAPI PERTANYAAN SAYA, TOLONG ITU DIKORELASIKAN DENGAN ANGKA KEMISKINAN.



kecil. Kalau tidak diamankan pantainya tentu ini sangat berbahaya," jelas Ketua Komisi V Lasarus usai memimpin tinjauan ke Pantai Kuta, Denpasar, Bali Senin (4/3).

la melanjutkan bahwa Komisi V akan mendorong pemerintah daerah maupun provinsi dan kementerian terkait untuk memperhatikan secara serius masalah abrasi ini. "Bali merupakan wajah Indonesia di kancah internasional sudah sepatutnya kita bersama stakeholder memiliki kewajiban menyokong dan mengembangkan Bali agar lebih nyaman," kata Lasarus.

Lebih lanjut, Lasarus bilang pihaknya mendorong pemerintah di Bali dan kementerian terkait memperhatikan dengan serius persoalan ini. Komisi V juga menemukan beberapa kendala dalam kunjungannya di Pantai Kuta yang nantinya dibawa ke rapat -rapat di Komisi terkait.

FOTO: MRI/PDT

mri/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin tinjauan ke Pantai Kuta, Denpasar, Bali Senin (4/3/2024).

Banyak Jumlah Desa Maju dan Mandiri, Kenapa Kemiskinan di Yogya Tinggi?

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyoroti angka kemiskinan di Yogyakarta yang masih tinggi. Bahkan berdasarkan informasi yang didapatkannya, kota pelajar ini menjadi yang termiskin di Pulau Jawa.

Padahal, di sisi lain, berdasarkan paparan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDPT), Yogyakarta menjadi daerah dengan jumlah desa maju dan mandiri yang tinggi. Karena itu, Sigit penasaran mengapa hal tersebut bisa terjadi. Seharusnya, semakin banyak desa maju berbanding lurus dengan tingkat perekonomian masyarakat.

"Tadi dalam diskusi, Ibu Dirjen Pembangunan Desa bahwa desa-desa di Yogyakarta itu sudah level maju bahkan mandiri, gak ada lagi

desa tertinggal. Tapi pertanyaan saya, tolong itu dikorelasikan dengan angka kemiskinan," ungkapnya dalam Kunker Reses Tim Komisi V DPR RI ke

”

TADI DALAM DISKUSI, IBU DIRJEN PEMBANGUNAN DESA BAHWA DESA-DESA DI YOGYAKARTA ITU SUDAH LEVEL MAJU BAHKAN MANDIRI, GAK ADA LAGI DESA TERTINGGAL. TAPI PERTANYAAN SAYA, TOLONG ITU DIKORELASIKAN DENGAN ANGKA KEMISKINAN. JADI KALAU DESANYA MAJU, OTOMATIS (SEHARUSNYA) KEMISKINANNYA BERKURANG. KORELASINYA ITU,

Provinsi D.I Yogyakarta. Senin (4/3).

Sesuai peraturan perundang-undangan, Desa merupakan mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka itu, sudah sewajarnya kemajuan desa akan memberi efek positif bagi perekonomian masyarakat.

"Jadi kalau desanya maju, otomatis (seharusnya) kemiskinannya berkurang. Korelasinya itu," jelas Politisi Fraksi PKS ini. Lebih lanjut, ia meminta Kementerian Desa PDPT membangun roadmap agar majunya desa berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan.

Sigit juga meminta pemerintah untuk mencari cara agar kesenjangan sosial di kota Yogyakarta bisa menyusut. Karena ia curiga salah satu alasan masih tingginya angka kemiskinan di Yogyakarta, tapi banyak desa maju adalah tingginya rentang kesenjangan sosial di masyarakat.

ndn/dn



FOTO:NDN/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat mengikuti pertemuan Kunker Reses Tim Komisi V DPR RI ke Provinsi D.I Yogyakarta, Senin (04/03/2024).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Pembangunan GIK dan Rusun Dosen UGM Harus Bermanfaat Optimal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) di Universitas Gadjah Mada (UGM). Anggota Komisi V DPR RI, Sudewo berharap agar UGM bisa memanfaatkan GIK tersebut dengan baik.

"Saya harap UGM mampu melakukan pengelolaan supaya GIK ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Betul-betul memberikan peran dan manfaat bagi sivitas akademika di Indonesia," ujarnya dalam Kunjungan Kerja (Kunker)

Reses Tim Komisi V ke Sleman, Provinsi DIY, Senin (4/3).

”

SAYA MENDORONG KEMENTERIAN PUPR, DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN UNTUK BISA DILAKUKAN JUGA (PEMBANGUNAN RUSUN) DI PERGURUAN TINGGI YANG LAIN.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu sendiri mengapresiasi keberadaan GIK. Menurutnya, GIK adalah satu infrastruktur yang penting bagi dunia pendidikan tinggi untuk merespon perkembangan zaman. Lewat GIK artinya, kata Sudewo UGM, sudah siap mendunia.

Besar harapan Sudewo agar GIK tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di internal UGM, tapi juga untuk masyarakat umum. Dengan demikian katanya UGM bisa menciptakan tenaga kerja yang andal bagi Indonesia.

Selain GIK, Kementerian PUPR juga membangun rumah susun (rusun) untuk tempat tinggal dosen UGM. Tim Kunker Reses Komisi V ke Provinsi D.I Yogyakarta yang dipimpin Mulyadi juga melakukan peninjauan ke tempat tersebut.

Sudewo pun turut mengapresiasi pembangunan rusun tersebut. Menurutnya kualitas bangunan rusun sudah cukup baik. Ia pun berharap agar pembangunan rusun seperti ini dibangun juga di kampus-kampus lain.

"Saya mendorong Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Perumahan untuk bisa dilakukan juga (pembangunan rusun) di perguruan tinggi yang lain," ujarnya. Sebagai informasi GIK saat ini sedang dalam proses pembangunan. Proyek ini menelan anggaran lebih dari setengah triliun rupiah. Progres fisiknya saat ini sudah mencapai 96 persen, dan ditargetkan selesai pada April 2024.

[nda/rdn](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi V DPR RI, Sudewo saat meninjau pembangunan rusun untuk tempat tinggal dosen UGM dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi V ke Sleman, Provinsi DIY, Senin (04/03/2024).

Optimalkan Persiapan dan Pelayanan Haji di Jateng

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily ingin mengetahui kinerja dan kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M di Provinsi Jawa Tengah, baik dari kesiapan administrasi, SDM, asrama, sarana prasarana maupun fasilitas pendukung lainnya. Ia menyampaikan, pada kesempatan kunjungan ini Komisi VIII ingin mengetahui perkembangan dari pendaftaran hingga proses persiapan penyelenggara ibadah haji.

Hal ini dimaksudkan agar penetapan calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci sesuai dengan kriteria dan regulasi yang ditetapkan. "Dari kunjungan ini dapat diketahui lebih lanjut tentang bagaimana mitra Komisi XIII

melakukan tugasnya," ujar Ace di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (29/2).

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno yang menerima kunjungan kerja Komisi VIII ini

berterima kasih. "Kami juga berterima kasih atas penambahan kuota jemaah haji, karena penambahan ini dapat mengurangi antrian jemaah haji," kata Sumarno.

Diketahui, di tahun 2024, Indonesia mengirimkan jemaah haji sebanyak 241 ribu orang. Jumlah itu setelah Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20 ribu. Termasuk untuk Provinsi Jateng mendapat kuota tambahan sebanyak 3.095 jemaah. Kebijakan itu diberikan karena Provinsi Jateng menjadi provinsi dengan antrean jemaah haji terbanyak kedua setelah Jawa Timur.

"Semoga dengan tambahan kuota ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kami juga akan semakin intens membantu peningkatan layanan haji 2024," papar Ace Hasan. **ssb/rdn**

”

SEMOGA DENGAN TAMBAHAN KUOTA INI DAPAT DIMANFAATKAN DENGAN SEBAIK MUNGKIN. KAMI JUGA AKAN SEMAKIN INTENS MEMBANTU PENINGKATAN LAYANAN HAJI 2024.



FOTO: EKO/PDT

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Boyolali.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi VIII Terima Usulan Tambahkan Alat untuk BPBD Kotabaru

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menerima perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotabaru, Kalimantan Selatan mengenai permintaan tambahan peralatan Pusdalops untuk mendukung program penanggulangan bencana.

Ia mengatakan pihaknya akan segera menyampaikan laporan permintaan tambahan peralatan untuk selanjutnya dibahas bersama BNPB.

"Kotabaru wilayah yang cukup rawan bencana alam, banjir dan tanah longsor terutama saat terjadi cuaca ekstrem. Tambahannya peralatan untuk mendukung kinerja BNPB sangat penting," ujar Ashabul dalam Audiensi dengan BNPB Kotabaru di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (6/3).

BPBD Kotabaru mengusulkan tambahan peralatan komputer 2 unit, printer dan scanner 2 unit, antena rig 3 unit, HT 10 buah, radio rig VHF 2 unit, radio UHF 2 unit, scanner database 1 unit, proyektor LCD 1 buah, layar LCD 1 buah, televisi flat

3 unit, gps 5 unit dan disaster mobil 1 unit.

Ashabul juga meminta kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan karena beberapa hari ini tingkat intensitas hujan cukup tinggi di Kotabaru. Ia mendorong BPBD melakukan giat patroli ke desa yang memiliki tingkat intensitas longsor cukup tinggi. "Permintaan tambahannya rinciannya sudah disampaikan itu semua untuk mendukung peralatan kerja BPBD dalam menghadapi bencana alam," tuturnya. **tn/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi usai menerima Audiensi dengan BNPB Kotabaru di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

FOTO: GER/PT

Kris Dayanti: Tugas Turunkan Stunting, Tugas Bersama

Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti mengatakan bahwa target menurunkan angka stunting di level 14% tahun ini merupakan tugas bersama. Seluruh kementerian dan lembaga punya andil, sebab tugas menangkal kekurangan gizi pada anak itu punya pendekatan multisektor.

pihaknya selalu mendorong target dari pemerintah dengan mendorong sosialisasi di berbagai tempat.

Di Tanjungpinang, tim kunjungan Komisi IX menemukan paparan dari pemerintah kota bahwa angka stunting di kota ini berhasil turun di tahun lalu. Menanggapi hal itu, KD tetap optimistis penurunan stunting akan diikuti oleh banyak daerah,

namun ia berharap klaim tersebut dapat dicek kembali.

"Dalam banyak kunjungan kerja kami, memang pemerintah daerah selalu klaim (angka stunting) di bawah nasional. Ini tugas kami mengecek dengan detail. Tetapi kami optimis menyelesaikan di periode ini (pengawasan stunting)," urai Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. **aha**

”

KAMI (KOMISI IX) MENEKANKAN KEPADA SELURUH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA, JADI BUKAN HANYA BKKBN SAJA (LEADING), TAPI SELURUHNYA DAPAT TERLIBAT. HAL INI MELIBATKAN BANYAK PIHAK DAN KITA HARUS SEMANGAT. DALAM BANYAK KUNJUNGAN KERJA KAMI, MEMANG PEMERINTAH DAERAH SELALU KLAIM (ANGKA STUNTING) DI BAWAH NASIONAL. INI TUGAS KAMI MENGECEK DENGAN DETAIL. TETAPI KAMI OPTIMIS MENYELESAIKAN DI PERIODE INI (PENGAWASAN STUNTING).

"Kami (Komisi IX) menekankan kepada seluruh kementerian dan lembaga, jadi bukan hanya BKKBN saja (leading), tapi seluruhnya dapat terlibat. Hal ini melibatkan banyak pihak dan kita harus semangat," ujarnya ditemui usai Kunjungan Kerja Reses Komisi IX di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2).

Meskipun di masa depan ada rencana program makan gratis, legislator yang akrab disapa KD ini bilang, masyarakat juga berhak tahu apakah nilai nutrisi dari makanan tersebut sudah mencukupi kebutuhan anak-anak. Sejauh ini

FOTO: AHA/PDT



Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IX di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Perlu Edukasi Masif Cegah Meningkatnya HIV/AIDS di Batam

Temuan kasus HIV-AIDS di Kepulauan Riau tercatat masih tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sepanjang 2023 kasus Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS) mencapai 700 kasus. Di Kota Batam sendiri, tercatat sebanyak 400 orang positif HIV sepanjang 2023.

Melihat masih tingginya angka HIV-AIDS di Batam, Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan masih tingginya kasus HIV-AIDS ini mungkin saja dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Selain itu, menurutnya, tingginya penyakit yang menurunkan sistem kekebalan tubuh

tersebut akibat dari Kota Batam sebagai daerah industri dan tujuan wisata.

Untuk itu, ia mendorong perlunya peningkatan edukasi kepada

masyarakat di Kepri, khususnya Kota Batam secara berjenjang terkait dengan penularan HIV-AIDS. Sebab, penularan HIV-AIDS yang terus meningkat dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"(Edukasi) terutama kepada generasi muda. Kalau misalnya tidak ada penanganan secara khusus

”

(EDUKASI) TERUTAMA KEPADA GENERASI MUDA. KALAU MISALNYA TIDAK ADA PENANGANAN SECARA KHUSUS MAKA NANTI AKAN BERTAMBAH TERUS. INI SANGAT BERBAHAYA KARENA PENYAKIT HIV INI SANGAT BERBAHAYA, SEHINGGA BISA MENAKIBATKAN BANYAK KORBAN DAN BISA MENIMBULKAN KERESAHAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT.



Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IX Batam, Kepri, Rabu (29/2/2024).

maka nanti akan bertambah terus. Ini sangat berbahaya karena penyakit HIV ini sangat berbahaya, sehingga bisa mengakibatkan banyak korban dan bisa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat," ujar Yahya kepada Parleментарia, di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IX Batam, Kepri, Rabu (28/2).

Selain Yahya, Anggota Komisi IX Darul Siska juga mendorong Pemda Kepri dan Pemda Batam untuk terus intensif mencegah HIV-AIDS meningkat di Kepri. Hal ini melihat Kepri merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain dan menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam free trade zone (kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas) yang memungkinkan pergerakan manusia antarnegara yang masif. [bia/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: BIA/PDT

Peran Guru BK Cegah Perundungan di Sekolah

Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru mendorong penguatan peran guru Bimbingan Konseling (BK) di setiap sekolah guna mencegah perundungan terus terjadi di lingkungan sekolah. Ia menilai guru BK berperan penting dalam mendampingi siswa di sekolah.

"Saya usul peran Guru BK tolong ditingkatkan, karena bagaimanapun mereka mau mengadu ke siapa sih ke sekolah, ke guru kadang segan, ke temen juga mungkin teman yang sesama dibully sama-sama," kata Ratih dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).

Untuk kasus perundungan yang lebih berat, lanjut Ratih, ia mengusulkan adanya pendampingan psikolog di sekolah. Terlebih setelah lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, UU tersebut dapat menjadi acuan pemberian pendampingan psikolog bagi siswa yang terlibat perundungan di sekolah.

"Untuk kasus yang lebih berat malah saya usul kita mungkin ada pendampingan seorang psikolog, apalagi kita kemarin sudah melahirkan Undang-Undang Psikologi, itu acuan dari situ bisa kita tarik bahwa untuk kasus yang berat begitu harus ada didampingi seorang psikolog," harapnya.

Selain itu, menurutnya peran orang tua juga perlu ditingkatkan

”

SAYA USUL PERAN GURU BK TOLONG DITINGKATKAN, KARENA BAGAIMANAPUN MEREKA MAU MENGADU KE SIAPA SIH KE SEKOLAH, KE GURU KADANG SEGAN, KE TEMEN JUGA MUNGKIN TEMAN YANG SESAMA DIBULLY SAMA-SAMA.

untuk ikut berperan mencegah perundungan terjadi. Dalam hal ini, sekolah perlu meningkatkan kesadaran kepada orang tua tentang bahaya kenakalan remaja dan perundungan.

"Saya merasa ini terkadang kita lah, si dewasanya, yang membiarkan hal ini. Kita melihat ini sebagai hal yang sudah normal saja, ini dinormalisasi oleh kita yang dewasa. Jadi justru peran sekolah ke orang tua itu juga harus ditingkatkan terkait kesadaran tentang ini," tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. **— bia/aha**



FOTO: DEP/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi X dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Lembaga Khusus untuk Dongkrak Tingkat Literasi Indonesia

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menjelaskan butuh lembaga khusus yang bertanggung jawab mendongkrak tingkat literasi di Indonesia. Sebab, berdasarkan data dari Tes Programme for International Student Assessment (PISA) yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), diperoleh bahwa Indonesia berada pada urutan ke-74 untuk tes literasi, urutan ke-73 untuk matematika, dan urutan

”

TES PEROLEHAN SKOR PISA TERSEBUT MENCERMINKAN BAHWA PENDIDIKAN INDONESIA SECARA UMUM BELUM BERHASIL MEMBENTUK PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI DAYA NALAR, LITERASI, DAN NUMERIK YANG BAIK.

ke-71 untuk sains dari 79 negara partisipan pada tahun 2018.

Hal itu disampaikan Andreas saat pertemuan dengan Bupati Sleman dan jajarannya di Aula Lantai 3 Setda Kabupaten Sleman, di Sleman, DIY, beberapa waktu lalu. Tes PISA sendiri adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia.

“Tes Perolehan skor PISA tersebut mencerminkan bahwa pendidikan Indonesia secara umum belum berhasil membentuk peserta didik yang memiliki daya nalar, literasi, dan numerik yang baik,” jelas Andreas di Sleman, Selasa (27/2).

Oleh sebab itu, Andreas menegaskan dibutuhkan lembaga khusus setingkat kementerian yang khusus mengurus literasi ini karena dianggap penting sebagai respons atas rendahnya nilai tes PISA negara Indonesia. Bahkan pada tingkat ASEAN, skor PISA Indonesia berada di bawah Malaysia, dan Brunei Darussalam. Secara konsisten, Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR menyerap aspirasi yang berasal dari berbagai jenis stakeholder termasuk di Kabupaten Sleman ini.

“Ke depan penting bagi negara untuk memperhatikan aspek literasi ini karena menyangkut kualitas sumber daya manusia dan tumbuh berkembangnya suatu peradaban masyarakat,” tukas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

ojo/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira saat pertemuan dengan Bupati Sleman dan jajarannya di Aula Lantai 3 Setda Kabupaten Sleman, di Sleman, DIY, Selasa (27/2/2024).

Foto: Oji/PDI

Harga Beras Naik Bukti Pemerintah Gagal Swasembada Beras

Melonjaknya harga beras yang merupakan tertinggi sepanjang sejarah, merupakan bukti kegagalan Pemerintah dalam menghadirkan swasembada beras. Oleh karena, pada akhirnya, ketersediaan beras dalam negeri bergantung pada impor dan mempengaruhi permintaan dan penawarannya.

"Memang persoalannya itu kan dari sisi produksi, barangnya, dan ini kan dimulai dari kegagalan Pemerintah melakukan swasembada beras. Karena gagal (swasembada beras lalu) bergantung kepada impor. Bergantung kepada impor ini menyangkut masalah harga, masalah ketersediaan berasnya dari negara-negara itu. Di situ yang akhirnya bisa menyebabkan tidak seimbang antara permintaan dan penawaran," kata Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Batam, Kepri, Sabtu (2/3).

"Karena gagal (swasembada beras lalu) bergantung kepada impor. Bergantung kepada impor ini menyangkut masalah harga, masalah ketersediaan berasnya dari negara-negara itu," jelasnya.

Dari sisi Bank Indonesia, Hidayatullah menilai sudah maksimal upaya yang dilakukan BI. Namun, persoalan kenaikan harga beras ini merupakan persoalan stok, yakni adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Meskipun saat ini berdasarkan informasi, menurutnya, seolah-olah

stok tetap ada, namun hal ini tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

”

KARENA GAGAL (SWASEMBADA BERAS LALU) BERGANTUNG KEPADA IMPOR. BERGANTUNG KEPADA IMPOR INI MENYANGKUT MASALAH HARGA, MASALAH KETERSEDIAAN BERASNYA DARI NEGARA-NEGARA ITU,

"Kalau stok ada *gak* mungkin harga naik, kan hukum alam tidak bisa diakalin. Artinya, kalau memang barang *gak* ada pasti otomatis harganya akan naik, kecuali spekulasi-spekulasi bermain. Kalau spekulasi bermain kan Pemerintah yang berkuasa gampang saja menurut saya. Jadi, saya lebih cenderung ini masalah ketersediaan stok," ungkapnya.

Politisi PKS ini meminta Pemerintah harus bersungguh-sungguh menyiapkan persediaan pangan. Jangan hanya untuk 4 sampai 5 bulan saja, melainkan untuk setahun. Sehingga persoalan klasik di mana terjadi kenaikan harga pangan jelang hari-hari besar tidak terjadi setiap tahun. — ndy/rdn



FOTO: NDIY/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Batam, Kepri, Sabtu (2/3/2024).



Pinjol Ilegal Masih Marak, Moratorium Terus Berlanjut

Fenomena pinjaman online (Pinjol) ilegal seperti tak habis jadi perbincangan. Pinjol ilegal masih menghantui sebagian masyarakat di daerah. Moratorium Pinjol pun diserukan terus berlanjut.

Dalam pertemuan Komisi XI DPR RI dengan otoritas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan OJK, di Batam, Kepulauan Riau, isu Pinjol masih jadi perbincangan menarik dan dominan. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin berharap OJK terus melanjutkan moratorium Pinjol, karena dinilai masih meresahkan masyarakat.

Pada saat yang sama, regulasi Pinjol mesti diperketat sambil mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan. "Ternyata kabar baiknya adalah moratorium pinjol itu akan terus dilanjutkan. Infrastruktur, sumber daya manusia, dan

”

TERNYATA KABAR BAIKNYA ADALAH MORATORIUM PINJOL ITU AKAN TERUS DILANJUTKAN. INFRASTRUKTUR, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGATURANNYA MASIH DIPERSIAPKAN OLEH OJK SENDIRI.

pengaturannya masih dipersiapkan oleh OJK sendiri,” ungkap Puteri.

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, jelang Ramadan dan lebaran, mungkin masih banyak masyarakat yang mengakses pinjaman lewat Pinjol untuk memenuhi kebutuhannya. Puteri berharap, fenomena Pinjol tak lagi menelan korban jiwa, seperti terjadi di dapilnya, Jabar VII (Bekasi, Depok).

"Kita sangat berharap menyambut bulan puasa dan lebaran ini tidak ada korban Pinjol yang bergelimpangan lagi. Khususnya di daerah pemilihan saya di Jawa Barat, Pinjol itu sudah memakan korban jiwa. Ada yang sampai bunuh diri karena ditagih," ungkap Puteri. ➡ **mh/aha**



FOTO: MH/PDI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin saat mengikuti pertemuan Komisi XI DPR RI dengan otoritas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan OJK, di Batam, Kepulauan Riau.

Bahas RUU DKJ, Baleg Segera Gelar Raker Bersama Mendagri

Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 secara resmi telah menyetujui Badan Legislasi DPR RI membahas RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Terkait hal itu, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya dalam satu hingga dua hari kedepan segera menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengingat status Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang hilang status sejak 15 Februari lalu karena adanya UU Ibu Kota Negara (IKN).

”

UNTUK DI BIDANG KESETARAAN GENDER, PEMERINTAH KANADA MEMPUNYAI PROGRAM KONKRET MENINGKATKAN SKIL WANITA-WANITA KHUSUSNYA YANG BERADA DI TARAF EKONOMI MENENGAH KE BAWAH.

“RUU DKI itu dia kehilangan status tanggal 15 Februari kemarin, kan itu implikasi dari UU IKN, 2 tahun itu kan berakhir 15 Februari. Sekarang DKI ini tidak ada statusnya. Nah itu yang membuat kita harus mempercepat (pembahasan RUU DKJ),” ujar Supratman saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menerangkan dalam pembahasan draf RUU DKJ bersama Mendagri tersebut nantinya juga akan membahas kembali status kekhususan Jakarta. Akan tetapi, ungkap Supratman, bukan dalam kapasitas sebagai Ibu Kota Negara namun dengan adanya status lain yang akan dibicarakan kembali bersama Pemerintah.

Menutup keterangannya, Supratman menegaskan Baleg DPR RI memiliki target untuk menyelesaikan RUU DKJ itu menjadi UU maksimal hingga 10 hari. “Kalau kita bisa raker lusa umpamanya, dalam waktu seminggu sampai 10 hari kerja sudah selesai, karena itu DKI sudah kehilangan status per 15 Februari kemarin,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna mengatakan bahwa penerimaan Surat Presiden tentang pembahasan RUU DKJ telah dibacakan pada Rapat Paripurna DPR RI sebelumnya. Dasco menjelaskan bahwa Pemerintah telah menugaskan lima menteri untuk bersama atau secara terpisah membahas RUU DKJ bersama DPR RI, salah satunya yaitu Mendagri. **pun/aha**

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.



FOTO: DOK/PTT



Bahas Kesetaraan Gender dan Energi Terbarukan

Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI - Parlemen Kanada yang dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI

Sari Yulianti menerima kunjungan Duta Besar Kanada, Jess Dutton. Dalam kunjungan ini kedua belah pihak membicarakan soal kerja sama di bidang kesetaraan gender dan energi terbarukan.

"Kerja sama Indonesia dengan Kanada antara lain di bidang ekonomi, energi, kesetaraan gender, dan pertukaran budaya *people to people*," ungkap Sari di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3). Politisi Fraksi Partai

”

UNTUK DI BIDANG KESETARAAN GENDER, PEMERINTAH KANADA MEMPUNYAI PROGRAM KONKRET UNTUK MENINGKATKAN SKIL BUAT WANITA-WANITA KHUSUSNYA YANG BERADA DI TARAF EKONOMI MENENGAH KE BAWAH.

Golkar ini menekankan pentingnya peningkatan skil bagi para wanita, sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kanada juga punya program konkrit dalam hal tersebut.

"Untuk di bidang kesetaraan gender, Pemerintah Kanada mempunyai program konkret untuk meningkatkan skil buat wanita-wanita khususnya yang berada di taraf ekonomi menengah ke bawah," jelas Sari. Dalam forum bilateral ini ia didampingi oleh Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Kanada Darizal Basir, di sisi lain dari Kedutaan Besar Kanada di Jakarta ada *First Secretary, Political and Public Affairs*, Stuart Shaw dan *Second Secretary, Development Cooperation Foreign Policy*, Thida Souksanh.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kanada dimulai sejak ditandatanganinya persetujuan kedua negara untuk masing-masing membuka perwakilan diplomatik pada tanggal 9 Oktober 1952. Secara historis hubungan kedua negara sudah dimulai sejak tahun 1948, yaitu di tengah usaha Indonesia mencari dukungan politik serta pengakuan internasional di forum PBB atas kemerdekaannya yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Dalam hal ini, Jenderal McNaughton (Kanada) sebagai Presiden DK-PBB di tengah keadaan yang tidak menentu pada pasca-Perang Dunia II berperan dalam menentukan keberhasilan diadopsinya suatu resolusi yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dukungan Kanada terus berlanjut melalui program Colombo Plan tahun 1950-an. **ssb/aha**

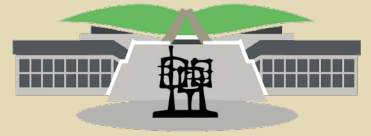


Scan QR untuk berita selengkapnya



Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI - Parlemen Kanada yang dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI Sari Yulianti menerima kunjungan Duta Besar Kanada, Jess Dutton di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

FOTO:RSB/PDT



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi saat meninjau SMK Negeri 2 Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbukti unggul miliki beragam fasilitas pembelajaran bagi peserta didiknya. FOTO: SKR/PDT

